

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh:

Nama : Putra Perdamaian Waruwu
NPM : 20230033
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Langkah Strategis Dinas Sosial Dalam Pengembangan
UMKM Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (Studi
Kasus diKecamatan Medan Sunggal Kota Medan)

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas HKBP Nommensen Medan.

Dengan demikian skripsi ini telah dilengkapi dengan syarat-syarat akademis
untuk Menempuh ujian skripsi untuk menyelesaikan studi.

SARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STRATA SATU (S-1) PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I



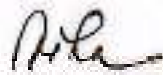
Prof. Dr. Drs. Marlan Hutahaean, MSI

Pembimbing II



Dra. L. Primawati Degodona, MSP

Ketua Program Studi



Dra. Artha Lumban Tobing, MSP

Dekan



Dr. Drs. Nalom Singian, MM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terpadu, terarah serta berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang termasuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM) yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga (Kementerian Sosial Republik Indonesia 2019). Hadirnya program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga dan pendapatan, sehingga pemerataan perekonomian nasional mempunyai struktur yang kuat dan seimbang, berdaya saing tinggi, mengandalkan sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas dengan harapan mampu memperbaiki kondisi ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Pemerintah berkewajiban mengantarkan dan menyiapkan masyarakat menghadapi tantangan persaingan usaha yang semakin kompleks dan kreatif (Hartanti dan Hendratmoko 2021). Untuk memperoleh tujuan akhir yang optimal, maka disusunlah strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan kemudian dituangkan ke dalam beberapa program serta diaplikasikan dalam bentuk kegiatan

sebagaimana diamanatkan
Nomor 23 tahun 2014
Daerah. Dinas sosial



Undang-undang
tentang Pemerintahan
sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan merupakan orang yang memiliki hak memimpin segala pelaksanaan urusan maupun program kebijakan daerah. Pembinaan, pelatihan teknis, keterampilan pengrajin, permodalan/penanaman modal, pendampingan, dan pengawasan merupakan tugas pemerintah. Menyadari peran dinas sosial yang begitu penting, bukan hanya komitmen yang kuat yang dibutuhkan namun diperlukan juga perencanaan yang matang untuk dapat mengembangkan energi potensial masyarakat, untuk itu diperlukan sebuah rencana strategis jangka panjang yang berkelanjutan.

Salah satu program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada dimedan terletak di Kelurahan Sunggal Kec. Medan Sunggal, yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution dengan nama KUBE “DeMI Kopi” tahun 2021 bergerak dibidang UMKM (Pemerintah Kota Medan 2021). DeMI Kopi ini beranggotakan 10 keluarga kurang mampu yang di prakasarai oleh Masjid Alwashliyah, kelompok usaha ini bergerak dibidang usaha minuman kopi yang kekinian yang tetap mempertahankan produk kopi lokal sebagai bahan baku utamanya. Program kelompok usaha ini sejalan dengan program Masjid Mandiri selain tempat beribadah, juga digunakan sebagai penggerak perekonomian yang bisa mensejahterakan dan meringankan beban perekonomian jamaah dan warga sekitarnya.

Gambar 1.1
Logo KUBE DeMI Kopi

Sumber: Dinas sosial pemkot medan.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan peneliti program ini masih menghadapi banyak kendala dalam pelaksanaan program yang dimaksud, antara lain: 1) keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan keuangan, 2) kurangnya pemahaman penerima modal penunjang usaha, 3) kurangnya langkah-langkah efektif untuk memantau penggunaan modal usaha, 4) terbatasnya tenaga kerja terampil, 5) serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap pedoman program pemberdayaan yang disosialisasikan, mengingat bahwa program tersebut memberikan dampak yang cukup baik.

Dari gambaran latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada langkah strategis yang dilakukan Dinas Sosial dalam upaya pengembangan UMKM dengan judul “Langkah Strategis Dinas Sosial Dalam Pengembangan UMKM Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (Studi Kasus di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana langkah strategis Dinas Sosial di Kota Medan dalam pengembangan UMKM melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui langkah strategis Dinas Sosial di Kecamatan Medan Sunggal dalam upaya pengembangan UMKM melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan langkah strategis pengembangan UMKM melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Sunggal, Medan Sunggal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini dapat menambah wawasan, Pengetahuan dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik dalam

dimensi Kebijakan. Serta dapat menjadi bahan evaluasi kepada peneliti dan dapat dijadikan sebagai referensi pengkajian masalah langkah strategis pengembangan UMKM.

b. Secara Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar mengenai langkah strategis pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam setiap penelitian harus ada titik tolak yang jelas sebagai landasan berpikir tentang proses penelitian dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang diteliti. Teori adalah seperangkat konstruksi (konsep), definisi, dan proposisi yang bertujuan untuk memvisualisasikan fenomena secara sistematis dengan mengidentifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna dalam menjelaskan fenomena tersebut. Suatu teori harus dapat diuji, jika tidak, maka ia bukan teori. Berdasarkan rumusan di atas, pada bagian ini peneliti akan mengajukan teori perspektif, suatu gagasan yang akan menjadi titik tolak refleksi dalam penelitian ini.

2.1 Langkah Strategis

Dalam Penelitian (Jihad. MZ 2005) menyatakan tentang maksud dari langkah strategi, yakni:

1. Langkah adalah tindakan atau perbuatan.
2. Strategis, yaitu tepat sasaran, pada tempat yang tepat.

Langkah strategis dalam pengertian di atas dapat dianggap sebagai tindakan dan perbuatan yang tepat atau baik. Suatu organisasi, suatu perusahaan tentunya mempunyai strategi dalam menjalankan pengelolaan usahanya. Dengan mengembangkan visi masa depan dan merancang strategi perusahaan, manajemen senior bersaing untuk memiliki visi masa depan dan menjadi yang pertama berhasil melawan perusahaan pesaing, namun untuk maju ke depan diperlukan strategi yang

lebih matang. Banyak perusahaan kaya sumber daya terpaksa memberi jalan kepada pesaing yang lebih kecil dan lebih miskin, yang pada akhirnya bergantung pada energi dan kekuatan karyawan mereka untuk memimpin masa depan. Yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana menggerakkan tenaga, memobilisasi tenaga, emosi, karyawan intelektual dan kreatif hadir di perusahaan. (Hasibuan 2007) mengatakan Pemerintah banyak yang tidak dapat berkembang dengan sukses karena tidak dapat mengambil keputusan atau strategi yang tepat dalam menjalankan pekerjaannya akibat campur tangan perusahaan pusat. Mereka melakukan pekerjaannya tanpa mengetahui dengan baik kemana arah perusahaan, sehingga yang mereka tahu hanyalah perintah dari pusat untuk melakukan pekerjaannya dan mencapai tujuan jangka pendek berupa keuntungan perusahaan.

2.1.1 Strategi

Untuk memahami hakikat dari suatu objek-objek atau peristiwa-peristiwa tentang suatu gejala sosial diperlukan dasar yang disepakati dan dimengerti oleh semua pihak, dasar yang dimaksud ialah konsep (*concepts*) (Silalahi 2015:174-190). Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2007, Strategi: (1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu di perang dan perdamaian; (2) ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang menguntungkan; (3) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus; (4) tempat yang baik menurut siasat perang. Berdasarkan beberapa definisi strategi dalam pengertian bahasa yang digunakan dapat kita simpulkan. Strategi adalah rencana jangka panjang yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Strategi haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh arah jangka panjang dan cakupan organisasi. Johnson dan Scholes menjelaskan bahwa:

“Strategi adalah arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka yang lebih panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah, dan secara khusus, dengan pasarnya, dengan pelanggan dan kliennya untuk memenuhi harapan stakeholder.”

Amstrong menambahkan bahwa setidaknya terdapat tiga pengertian strategi. Pertama, strategi merupakan deklarasi maksud yang mendefinisikan cara untuk mencapai tujuan, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya dan kapabilitas dengan lingkungan eksternal. Kedua, strategi merupakan perspektif di mana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak yang besar serta jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi. Ketiga, strategi pada dasarnya adalah mengenai penetapan tujuan (tujuan strategis) dan mengalokasikan atau menyesuaikan sumber daya dengan peluang (strategis berbasis sumber daya) sehingga dapat mencapai kesesuaian strategis antara tujuan strategis dan basis sumberdayanya.

Berdasarkan definisi diatas secara keseluruhan, strategi dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan penting untuk merencanakan dan melaksanakan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang penting untuk memperhatikan dan mencapai tujuan dan sasaran dasar. Daya saing berkelanjutan yang ideal, kekuatan komparatif, sinergi, arah, ruang lingkup, perspektif umum jangka panjang, merupakan hal baik bagi setiap individu dan organisasi.

2.1.2 Langkah Strategis Kebijakan

Strategi dalam kebijakan publik ada beberapa teori yang dapat digunakan dan diperhatikan, adalah sebagai berikut:

- a) Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory): Teori ini menyatakan bahwa para pembuat kebijakan secara rasional memilih Langkah-langkah strategis berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat yang diharapkan. Teori bisa memaksimalkan hasil positif dan meminimalkan hasil negatif.
- b) Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory): Teori ini berfokus pada bagaimana para pembuat kebijakan public berinteraksi dengan kelompok kepentingan dan bagaimana Langkah-langkah strategis dipengaruhi oleh dinamika politik dan pengaruh kepentingan yang ada.
- c) Teori Advokasi Koalisi (Advocacy Coalition Framework): Teori ini mengemukakan bahwa pembuat kebijakan dan kelompok kepentingan per organisasi dalam koalisi yang berusaha mempengaruhi proses kebijakan.
- d) Teori Inkrementalisme (Incrementalism): Mengemukakan bahwa kebijakan berkembang melalui perubahan bertahap dan incremental, dengan Langkah- langkah strategis yang melibatkan penyesuaian kecil atau modifikasi terhadap kebijakan yang sudah ada.
- e) Teori pendekatan Sistem (Systems Approach): Teori ini menganggap kebijakan publik sebagai system yang kompleks, dengan interaksi berbagai elemen yang saling terkait.

- f) Teori Pengembangan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory): Teori ini menekankan perlunya langkah-langkah strategis kebijakan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan.
- g) Teori Transformative (Transformative Theory): Teori ini menyoroti perlunya perubahan yang signifikan dan transformasional dalam kebijakan publik.

2.1.3 Indikator Keberhasilan Strategi

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi secara efektif dan efisien. Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realistis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Uraian tentang faktor-faktor kunci keberhasilan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang ada, studi organisasi serta mencari solusinya dengan cara melaksanakan strategi untuk menanggulangnya strategi didefinisikan sebagai suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Sesuai dengan visi, misi dan tujuan tersebut dalam rangka mewujudkan keberhasilan Pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan yang

berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan, maka strategi yang akan dilakukan dalam adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM secara lebih proporsional dan efisien melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, short course dan pendidikan penjenjangan.
2. Peningkatan kualitas rencana pembangunan daerah melalui penyelenggaraan forum pertimbangan perencanaan pembangunan daerah, forum satuan kerja daerah, focus group diskusi, dan konsultasi publik yang merupakan instrumen koordinasi rencana kegiatan pembangunan.
3. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan dengan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta penelaahan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan
4. Memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam proses penyusunan rencana pembangunan (dengan memberikan pedoman) bagi Perencanaan Pembangunan daerah kabupaten/kota, Rapat Koordinasi dan Permusyawaratan, Perbandingan pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan, Sosialisasi Dokumen Perencanaan di Tingkat Pemerintahan Daerah, dan Kabupaten/Kota.

2.1.4 Tahapan Penyusunan Strategi

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk mewujudkannya. Berdasarkan rumusan pengertian dari definisi strategi sebelumnya, maka terdapat beberapa tahapan umum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu:

- a. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan.
- b. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis.
- c. Menyusun perencanaan tindakan (action plan).
- d. Menyusun rencana penyumberdayaan.
- e. Mempertimbangkan keunggulan.
- f. Mempertimbangkan berkelanjutan

2.2 Perencanaan Strategis

Perencanaan adalah suatu fungsi manajemen yang dihubungkan dengan pemilihan tujuan, kebijakan, prosedur, program dari antara pilihan pengganti yang ada (Nawawi dkk. 2023). Sedangkan pengertian perencanaan strategis menurut Olsen dan Eadie (Sarah.Aira 2011) adalah upaya yang disiplin mengambil keputusan dan tindakan penting untuk menentukan bentuk dan pedoman bagaimana suatu organisasi (atau entitas lain) apa yang terjadi, apa yang dilakukannya terhadap organisasi (atau entitas lain), dan mengapa organisasi (atau entitas lain) melakukan tindakan tersebut.

Wheelen-Hunger mengatakan bahwa perencanaan strategi mempunyai beberapa elemen dasar, yaitu:

1) Pengamatan Lingkungan

Pengamatan lingkungan ini terdiri dari dua bagian yaitu. Lingkungan eksternal dan lingkungan internal.

1) Perumusan strategis

Adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan lembaga. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan/organisasi, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, mengembangkan strategi dan menetapkan pedoman kebijakan.

2) Implementasi strategi

Proses mewujudkan strategi dan kebijakan dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.

a. Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai.

b. Anggaran merupakan program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program yang dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.

c. Prosedur adalah suatu sistem langkah-langkah yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

3) Evaluasi dan Pengendalian.

Proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil kinerja yang dimonitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan kinerja yang diinginkan

Perencanaan strategis digunakan dengan tujuan membantu organisasi mencapai misinya, memfokuskan sumber daya organisasi, memastikan elemen organisasi bekerja menuju tujuan yang sama, dan mengevaluasi dan menyesuaikan arah organisasi, untuk menanggapi perubahan lingkungan. Lingkungan sektor publik mulai sering berubah dengan cara yang sulit diprediksi. perencanaan strategis adalah analisis dan pengambilan keputusan strategis mengenai masa depan suatu organisasi guna memposisikan (position) organisasi tersebut di masa depan. Karena itu, bahasa yang digunakan dalam menyusun rencana strategis harus jelas, realistis dan tidak mempunyai makna ganda sehingga dapat dijadikan pedoman/panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Tujuan strategis menunjukkan arah atau kemauan organisasi memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai misi yang telah ditetapkan. Dengan menetapkan tujuan strategis, kita dapat melihat dengan jelas apa yang perlu dilakukan organisasi untuk mencapai visi dan misinya dalam 1 hingga 5 tahun ke depan.

Dalam menyusun rencana strategis, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyusun visi yang memberikan gambaran tentang arah yang harus dituju oleh

instansi pemerintah agar dapat bertahan, menjadi pionir dan berinovasi. Untuk lebih menjelaskan visi yang telah diidentifikasi, pemerintah daerah menetapkan misi. Misi adalah apa yang harus dilakukan instansi pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dicapai. Pada prinsipnya beberapa langkah umum untuk melakukan perencanaan strategis, yaitu merumuskan visi dan misi organisasi, melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal dengan melakukan tinjauan terhadap lingkungan.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan sebagai UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda (Sitoro Simunawir 2022). Pengertian UMKM menurut kriterianya yaitu:

- 1) Usaha Mikro Usaha Mikro dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang memiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha Kecil Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang indenpenden atau berdiri sendiri yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan memiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

3) Usaha Menengah Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersih sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan (Niode Idris Yanto 2009).

Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

mempunyai definisi yang berbeda-beda mengacu pada kriteria kelembagaan atau kelembagaan serta peraturan perundang-undangan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan pada masing-masing unit usaha, yaitu: Usaha kecil adalah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja orang yang berjumlah 5 sampai 19 orang. Dan usaha menengah merupakan unit usaha yang mempekerjakan 20 hingga sampai 99 orang. (Kementerian Keuangan, 2012: 4). UMKM mewakili tumbuh dan berkembangnya dunia usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi dan perekonomian berkeadilan. Artinya UMKM merupakan instrumen perjuangan nasional untuk tumbuh dan berkembang serta membangun perekonomian nasional dengan menjaring sebanyak-banyaknya pelaku ekonomi sesuai potensi yang dimilikinya atas dasar keadilan kepada semua pihak yang terlibat. UMKM merupakan potensi usaha yang sangat digalakkan oleh pemerintah, karena semakin banyak masyarakat yang giat maka perekonomian daerah akan semakin baik dan kuat, karena sumber daya tenaga kerja lokal dan keuangan daerah dapat terserap dan mendapatkan manfaat yang optimal. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh UMKM. Karena UMKM merupakan pemain kunci di masyarakat

karena dapat memberikan pendapatan bagi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dan dapat berperan aktif dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga merupakan industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UMKM merupakan entitas ekonomi yang terlibat dalam berbagai sektor usaha yang mempengaruhi kepentingan masyarakat. Secara ekonomi, UMKM mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara dalam arti berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan produk domestik bruto (PDB).

2.3.2 Karakteristik UMKM

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c) Modal terbatas
- d) Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.

- f) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

2.3.3 Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.
- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.

- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Dibalik kekuatan yang dimilikinya UMKM memiliki beberapa kelemahan, yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Industri Kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Industri Kecil.

d. Kendala permodalan usaha sebagian besar Industri Kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan Pembina UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih. Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan Lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh UMKM (Tristiarto dan Kusmana 2021). Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM meperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun. Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, Perusahaan swasta.

Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

2.4 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2.4.1 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok Usaha Bersama Masyarakat Fakir Miskin (KUBE-FM) merupakan salah satu wahana pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kapasitas anggota keluarga miskin untuk memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi perbaikan kesejahteraan sosial mereka. Pada tataran sosial, KUBE merupakan wadah berkumpulnya anggota keluarga miskin sehingga mampu melakukan interaksi sosial yang positif dan demokratis. Melalui KUBE, anggota komunitas keluarga miskin dapat meningkatkan kemampuan komunikasinya, menyelesaikan permasalahan individu dan kolektif secara timbal balik, yang pada akhirnya menjunjung harkat dan martabat kemanusiaannya. Secara ekonomi, kegiatan komersial yang dilakukan secara berkelompok memberikan kekuatan untuk menyatukan kekuatan modal, daya saing, membangun jaringan, membuka peluang akses. Keberadaan kelompok terikat pada harapan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan yang tidak dapat mereka capai sendiri kelompok usaha bersama dengan bekerjasama dengan orang lain. Seseorang akan tetap berada dalam kelompok sepanjang masih percaya bahwa menjadi bagian dari kelompok tetap lebih menguntungkan dibanding meninggalkannya.

Program KUBE-FM dibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial dan kesejahteraannya. Melalui program KUBE-FM, mereka dapat dibantu untuk memulai usaha sebagai langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik. Kelompok Usaha Bersama merupakan sarana untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam meningkatkan pendapatan), memotivasi keluarga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, serta memperkuat budaya kewirausahaan. Kegiatan usaha diberikan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan saran prasarana ekonomi. Tujuan program secara umum adalah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program pemberdayaan dan pendayagunaan potensi serta sumber kesejahteraan sosial bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Sasaran program Kelompok Usaha Bersama adalah keluarga miskin tidak mempunyai sarana penghidupan atau keluarga mempunyai sarana penghidupan namun sarana tersebut sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok (makanan, sandang), air minum, kesehatan dan pendidikan).

2.4.2 Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pembentukan kelompok usaha bersama Kube dibentuk berdasarkan nilai-nilai filosofis “dari”, “dari” dan “untuk” Masyarakat. Artinya keberadaan kelompok usaha dimana saja (desa atau kota) berasal dan berada di dalam masyarakat. Didirikan oleh komunitas lokal dan penggunaannya juga ditujukan kepada anggotanya dan komunitas lokal. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan KUBE harus sesuai dengan nilai dan norma budaya setempat, harus sesuai dengan keberadaan sumber daya dan potensi yang tersedia di lingkungan setempat, serta harus sesuai dengan kapasitas sumber daya manusia yang ada (anggota KUBE). KUBE merupakan pendekatan terpadu dan keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat. Pelatihan KUBE diawali dengan proses pembentukan kelompok melalui orientasi sosial, pelatihan profesional, dukungan stimulasi dan pendampingan.

2.4.3 Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Tujuan Kelompok Usaha Bersama diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan melalui :

- a. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok.
- b. Peningkatan pendapatan atau peningkatan kemampuan anggota kelompok KUBE didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari ditandai dengan: meningkatkan pendapat keluarga, meningkatkan kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan tingkat

pendidikan; dapat melaksanakan kegiatan keagamaan; dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan kebutuhan social lainnya

c. Perkembangan usaha

d. Meningkatkan kesadaran dan solidaritas sosial antar anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar atau , meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE dalam mengekspresikan peran sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakatnya, ditandai dengan , menumbuhkan kepedulian dan rasa tanggung jawab dan anggota berpartisipasi dalam upaya perlindungan sosial di lingkungannya.

2.4.4 Kelembagaan KUBE

Dari segi kelembagaan, setiap keluarga KUBE didirikan mempunyai organisasi, yaitu:

a. Kriteria keanggotaan

1) Rumah tangga miskin dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan

2) Masyarakat yang mempunyai perumahan stabil

3) Usia kerja

4) Menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan kelompok

Memiliki potensi dan keterampilan di sektor ekonomi tertentu

b. Jumlah anggota KUBE

- 1) Jumlah anggota KUBE dapat berbeda-beda tergantung kebutuhan sebenarnya, situasi dan kondisi setempat/setempat serta kesepakatan kelompok itu sendiri.
 - 2) Jumlah KUBE terdiri dari 5 sampai 10 keluarga (kelompok Kube kecil)
 - 3) Karena sifat kegiatan dan minat tertentu, kelompok KUBE dapat mencakup kelompok besar (gabungan dari beberapa kube atau kelompok kecil). Namun pelatihan rutin tetap dilakukan pada kelompok KUBE kecil
 - 4) Kelompok KUBE yang anggotanya tergolong keluarga miskin dapat menyeleksi anggota yang tidak termasuk dalam kelompok miskin namun memiliki jiwa wirausaha namun mewakili anggota yang bukan termasuk keluarga miskin hanya 20% dari anggota KUBE yang telah ditetapkan.
- c. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membentuk kelompok
- 1) Kedekatan dengan tempat tinggal
 - 2) Jenis usaha atau keterampilan anggota
 - 3) Ketersediaan sumber daya/lokasi geografis
 - 4) Asal budaya
 - 5) Motif yang sama
 - 6) Keberadaan kelompok masyarakat kelompok bertambah
- d. Struktur dan Pengurus KUBE

- 1) Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang wajib dilaksanakan. Melalui struktur kita dapat mengetahui “siapa mengerjakan apa”, siapa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab apa.
 - 2) Susunan KUBE sangat bergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dilaksanakan oleh KUBE
 - 3) Susunan KUBE meliputi: ketua, sekretaris, bendahara
 - 4) Pengarahan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama .
- e. Kewajiban Anggota
- 1) Mematuhi dan mematuhi semua peraturan yang berlaku peraturan yang telah disepakati
 - 2) Mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama
 - 3) Mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak yang berbeda
 - 4) Menggunakan modal untuk menunjang usaha dengan penuh tanggung jawab .

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang langkah strategi pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM ini sudah pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik tujuan, teknik pengumpulan data dan lain sebagainya. Berikut dijelaskan dibawah ini.

Tabel 2.1

No.	Penulis/ Tahun	Judul	Hasil
------------	-----------------------	--------------	--------------

Penelitian Terdahulu

1.	Monika Dwiki Salam, Ananta Prathama. (2022)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan UMKM.	Pengembangan UMKM dikampung Kue, Dinas Koperasi UKM dan perdagangan kota Surabaya telah melaksanakan perannya dengan baik sebagaimana yang telah diukur melalui indikator stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor. Peran yang ditunjukkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya merupakan upaya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kampung Kue melalui berbagai kegiatan agar UMKM di Kampung Kue dapat semakin maju, berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi
2.	(Parhusip Arisman 2020)	Peranan Pemerintah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui E-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Sunggal Medan.	Pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Medan Sunggal telah berhasil. Program KUBE terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat di Kecamatan Sunggal. Setelah itu, acara bulanan produk tetap diadakan dengan tujuan untuk mempromosikan dan memamerkan produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing KUBE, meskipun masih ada beberapa KUBE yang terkendala pemasaran dan kesulitan bahan baku.
3.	(Rahmadani dan Subroto 2022)	Analisis Strategi Pengembangan UMKM Kabupaten Sidoarjo di Masa Pandemi Covid-19	Faktor yang menyebabkan menurunnya keberadaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo antara lain keterbatasan modal, bahan baku yang mahal dan langka serta peralatan produksi yang sederhana dan terbatas, permasalahan pembukuan, terbatasnya pemasaran, permasalahan dalam menentukan lokasi dan tata letak usaha, lemahnya keterampilan manajerial, lemahnya pengelolaan sumber daya, sumber daya manusia, iklim usaha yang tidak menguntungkan, masalah rantai pasok dan inventaris, tidak tersedianya pelatihan dan bimbingan oleh pemerintah, masalah pendistribusian produk dari produsen kepada konsumen, proses perizinan usaha yang rumit dan tidak adanya transportasi produksi.

4.	(Solang, Kaawoan, dan Sumampow 2019)	Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Selatan	Program pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka pengembangan UKM berjalan dengan baik dimana terlihat adanya beberapa program seperti Gebyar UKM Indonesia tahun 2018 di Minahasa Selatan, program peminjaman modal usaha dan program pelatihan dan pembimbingan usaha yang bekerjasama dengan kementerian Koperasi dan UKM
----	--------------------------------------	---	---

Dari keempat penelitian terdahulu diatas adapun yang menjadi persamaan di dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam merangkum kondisi dilapangan penelitian didalam mencapai tujuan yakni pengembangan UMKM. Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ialah terletak pada fokus penelitian, dimana akan fokus pada langkah strategis Dinas Sosial dalam Upaya pengembangan UMKM melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diselesaikan melalui langkah strategi kebijakan.

2.5.1 Keaslian dan Posisi Penelitian

Penelitian tentang langkah strategis pemerintah dinas sosial dalam pengembangan UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah topik yang luas dan telah banyak diteliti sebelumnya. Namun penelitian yang memiliki keaslian dan posisi penelitian berikut tinjauan literatur yang cukup untuk memperhatikan penelitian terbaru tentang langkah strategi pemerintah dalam mengembangkan UMKM.

1. (Parhusip Arisman 2020) Mengatakan bahwa pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Medan Sunggal telah berhasil. Program KUBE terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan dan memberdayakan masyarakat di Kecamatan Sunggal. Setelah itu, acara bulanan produk tetap diadakan dengan tujuan untuk mempromosikan dan memamerkan produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing KUBE, meskipun masih ada beberapa KUBE yang terkendala pemasaran dan kesulitan bahan baku. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah telah memenuhi perannya dalam memperkuat perekonomian masyarakat.
2. (Salam dan Prathama 2022) Menyebutkan Pengembangan UMKM dikampung Kue, Dinas Koperasi UKM dan perdagangan kota Surabaya telah melaksanakan perannya dengan baik sebagaimana yang telah diukur melalui indikator stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor. Peran yang ditunjukkan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Surabaya merupakan upaya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kampung Kue melalui berbagai kegiatan agar UMKM di Kampung Kue dapat semakin maju, berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi
3. (Solang, Kaawoan, dan Sumampow 2019) Program pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka pengembangan UKM berjalan dengan baik dimana terlihat adanya beberapa program seperti Gebyar UKM Indonesia tahun 2018 di Minahasa Selatan, program

peminjaman modal usaha dan program pelatihan dan pembimbingan usaha yang bekerjasama dengan kementerian Koperasi dan UKM.

Posisi dan Keaslian penelitian saya yaitu, Langkah Strategis Dinas Sosial di Kecamatan Dinas Medan Dalam Pengembangan UMKM Melalui Program Kelompok Usaha Bersama, dengan mengkaji indikator keberhasilan strategi menggunakan tahapan prosedur penyusunan strategi.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir metode konseptual Kerangka berpikir yang dapat membantu seseorang untuk mengatasi kompleksitas, menjelaskan fenomena, dan mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti antara lain:

Desain penelitian ini didasari oleh adanya fenomena berupa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut, Untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi peran penting pemerintah dinas sosial dalam melakukan Langkah strategis pengembangan UMKM sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
2 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA
KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR
MISKIN



PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NO 33 TAHUN 2021
TENTANG
KRITERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU



Langkah Strategis Dinas Sosial



Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin
dalam Mengembangkan Kemampuan
Dasar

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif menekankan pada analisis atau deskriptif. Dalam proses penelitian kualitatif, hal-hal yang termasuk dalam perspektif topik lebih ditekankan dan landasan teori digunakan oleh peneliti sebagai pedoman, agar proses penelitian sesuai dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan saat melakukan penelitian

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, metode kualitatif mengutamakan pengamatan terhadap fenomena dan mempelajari lebih jauh tentang makna dari fenomena tersebut. Analisis dan kedalaman penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh kekuatan kata dan frasa yang digunakan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Medan dan di Kecamatan Medan Sunggal. Peneliti memilih Kecamatan Medan Sunggal karena lokasi dimaksud memiliki kegiatan pengembangan UMKM melalui Kelompok Usaha Bersama yakni

KUBE DeMI Kopi dibawah naungan Dinas Sosial. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari Desember 2023 sampai Januari 2024.

3.3 Informan Penelitian

Adapun penentuan informan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas tentang konflik yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Ibu Bungamin Subarti SH, M.H selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Medan.
- b. Informan utama individu atau kelompok yang digunakan sebagai informan pertama atau sumber berita dalam menyampaikan ilustrasi teknis tentang masalah penelitian. Informan utama adalah orang yang mengetahui masalah penelitian untuk diteliti secara profesional dan lebih baik. Oleh karena itu, untuk informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Tahi Simanjuntak selaku Pendamping KUBE di Kecamatan Medan Sunggal.
- c. Informan tambahan adalah individu atau yang terlibat langsung dalam dipenelitian dan mengetahui permasalahan yang akan diteliti serta mampu memberikan informasi tambahan. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah Ibu Fatima Selaku Ketua Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) DeMI Kopi yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Medan Sunggal.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada dilapangan (Sugiyono, 2010:338). Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan antara lain:

1. Data Primer

a. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan tujuan mengumpulkan keterangan atau data mengenai objek. Wawancara mendalam bersifat terbuka dan tidak terstruktur serta tidak formal. Sifat terbuka dan terstruktur ini maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara tidak bersifat kaku, namun bisa mengalami perubahan sesuai situasi dan kondisi dilapangan (fleksibel) dan ini hanya digunakan sebagai guidance.

2. Data Sekunder

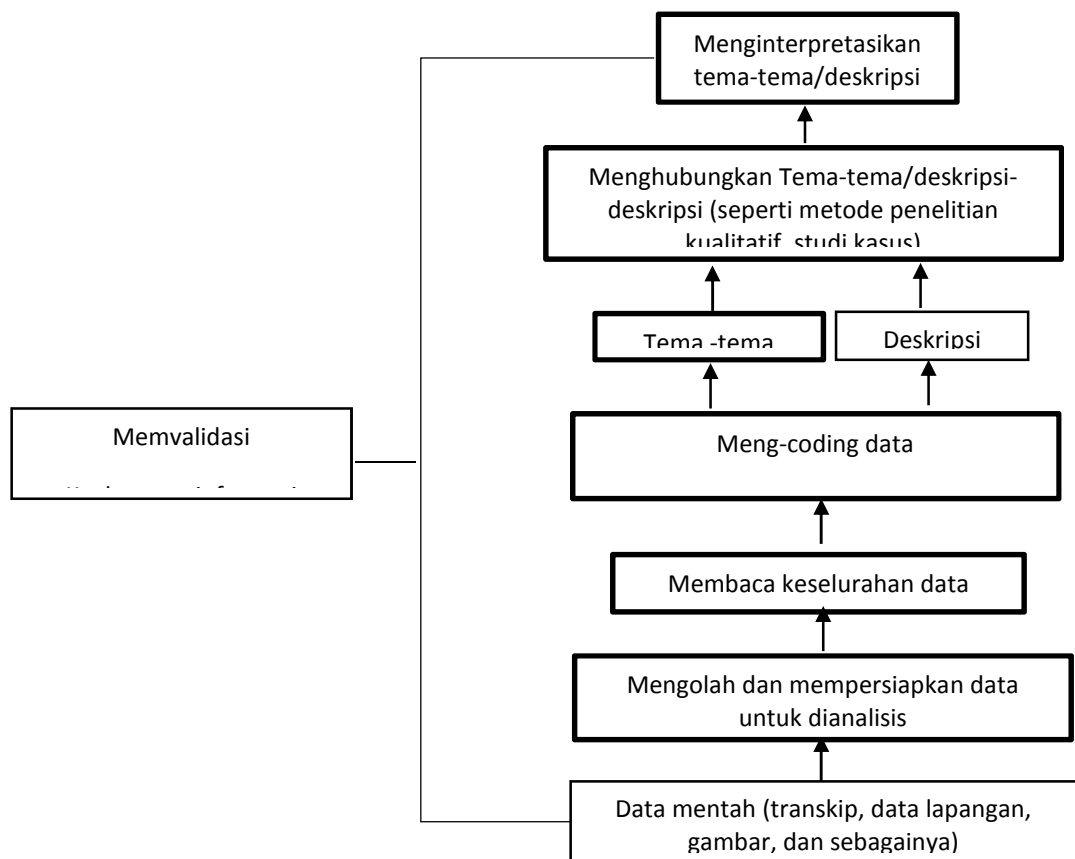
b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

3.5 Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah Model Analisis Interaktif (Creswell 2013:232-233). Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan penerapan langkah-langkah spesifik hingga yang umum dengan berbagai level analisis yang berbeda, yaitu:

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini meliputi perekaman wawancara, pemindaian dokumen, penggalian data lapangan, atau pengklasifikasian dan pengorganisasian data ke dalam kategori berbeda berdasarkan sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membentuk gambaran umum tentang informasi yang diperoleh dan memikirkan maknanya secara keseluruhan.
3. Analisis lebih rinci dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman & Rallis, 1998: 171). Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf dan gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan (disebut istilah *in vivo*).
4. Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan di-analisis yang akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
5. Langkah terakhir dalam analisis data adalah meng-interpretasi atau memaknai data.



Gambar 3.1
Model Analisis Interaktif Creswell

